



Arab Spring: Kontraksi Demokrasi

Kisah Revolusi Arab ini bermula dari seorang pemuda bernama Mohamed Bouazizi. Pria 26 tahun itu memutuskan untuk bekerja menjadi pedagang kaki lima, penjual buah dan sayuran di Sidi Bouzid, kira-kira 300 km jauhnya di selatan ibu kota Tunisia. Bouazizi adalah satu di antara kurang lebih 300 ribu sarjana lulusan S1 di negeri itu yang barangkali kurang bernasib mujur karena tak juga mendapat pekerjaan mapan. Masalah pengangguran seperti yang dialami Bouazizi itu kelak menjadi faktor utama yang melatarbelakangi berkobarnya Revolusi Tunisia.

Hari itu, 17 Desember 2010, polisi pengaman menyita lapaknya, sebab ia belum mendapat izin berdagang. Bouazizi tidak terima. Mungkin ia merasa tak punya kuasa untuk melawan, atau ia sudah benar-benar frustrasi dengan pemegang kebijakan negerinya yang menurutnya tak mampu memecahkan masalah pengangguran. Bouazizi tiba-tiba

melumuri badannya dengan bensin, lalu memercikkan api—ia membakar diri. Tragis memang, tapi itu, betapapun demikian, merupakan jenis perlawanan tanpa kekerasan, walaupun ekstrem.

Yang jelas, api Bouazizi bukan hanya membakar dirinya, tapi menyulut semangat banyak orang yang kurang lebih senasib dengannya. Api Bouazizi itu adalah pemantik momentum, yang apinya kelak tidak hanya membakar semangat Revolusi Melati di Tunisia, tapi menyeberang ke timur, hingga hampir semua negara di Timur Tengah tersulut api Bouazizi. Nama Bouazizi menyebar, disebut-sebut orang, ditulis di dinding-dinding bangunan di Tunisia, ditiru langkahnya—bukan hanya di Timur Tengah, hampir setahun kemudian di Indonesia, Sondang Hotagalung, mahasiswa Universitas Bung Karno, aktivis HAM, mencoba seperti Bouazizi.

Barangkali Bouazizi tidak mengira, apinya akan mampu menumbangkan dua pemimpin negara-negara tetangganya. Sebelas bulan setelah aksi bakar dirinya, tiga presiden telah lengser dari takhta kekuasaan. Bulan Januari, Zine el-Abidine Ben Ali melarikan diri ke Arab Saudi, Hosni Mubarak tumbang pada Februari, dan pada Oktober menyusul Muammar Qadhafi tewas di tangan pasukan oposisi.

Gelombang protes di Timur Tengah tahun 2011 itu menyebar amat cepat. Memicu rakyat di negara-negara Arab untuk ikut menumbangkan kediktatoran penguasanya. Maka, beberapa pemimpin mengantisipasi lebih dini agar api Bouazizi tidak ikut menyulut protes di negerinya.

Sehingga wajar, penguasa Sudan, Presiden Omar al-Bashir bersikeras tidak akan menyelenggarakan pemilu

hingga 2015. PM Irak, Nouri al-Maliki demikian juga, tak mau mundur hingga habis masa jabatannya pada 2014, walaupun sudah ada beberapa percik protes menuntut dirinya untuk turun takhta. April 2011, Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, masih bersikeras tidak mau mundur. Presiden Yaman mengajukan kesepakatan dengan oposisi Yaman, 26 April akan mundur. Tapi kenyataannya, ia mengingkari janjinya.

Berkobarnya Api Revolusi

Rezim diktator, pelanggaran HAM, pengangguran, kemiskinan, naiknya harga kebutuhan pokok, terlantarnya nasib buruh, dan monopoli kekayaan serta korupsi oleh para pejabat adalah sekian dari banyak faktor yang menyebabkan berjangkitnya “virus” revolusi di negara-negara Timur Tengah. Bouazizi hanyalah pemantik. Sebab, sebelum aksi bakar dirinya, masalah-masalah ekonomi-politik sudah cukup pelik dan mengendap lama.

Tunisia sudah mengalami konflik dalam tiga tahun terakhir. Seperti di kawasan pertambangan Gafsa pada 2008. Sempat terjadi protes beberapa bulan di situ dengan wujud aksi demo dan mogok kerja, menuntut perbaikan nasib para buruh yang terlantar dan digaji kurang layak.

Model di Tunisia sempat juga ditiru oleh para buruh pabrik tekstil di al-Mahalla al-Kubra, kawasan dekat Kairo. Pemogokan kerja di Mesir itu berlangsung pada tahun yang sama. Model protes mogok kerja lantas menginspirasi sebagian para kawula muda. Dengan *page Facebook*, mereka sempat mempromosikan protes dengan cara mogok kerja, hingga kemudian terbentuklah Komite 6 April, yang beranggotakan

para pemuda terdidik dan aktivis gerakan buruh yang kelak menjadi kekuatan utama anti-Mubarak dalam demonstrasi 25 Januari 2011.

Gelombang protes di Mesir itu, atau disebut juga dengan Revolusi 25 Januari, dikomando via jejaring sosial. Hampir seribu orang berkumpul di alun-alun Tahrir, Kairo. Pemerintah setempat mungkin merasa takut, maka pada tengah malam tanggal 28 Januari mereka menghentikan koneksi internet demi menghambat gerakan protes. Bukannya mengurungkan niat, puluhan ribu protes justru segera menggema di beberapa kota besar. Hingga kelak Presiden Hosni Mubarak harus membubarkan kabinetnya, dan untuk pertama kalinya mengangkat wakil presiden sejak 30 tahun terakhir.

10 Februari, Mubarak menyerahkan kekuasaan presiden kepada Omar Suleiman. Para demonstran belum bisa menerima, Suleiman dipandang kurang memenuhi tuntutan revolusi. Suleiman lalu menyatakan bahwa kekuasaan sementara akan dipegang oleh Majelis Tertinggi Angkatan Bersenjata (al-Majlis al-'Ala li al-Quwat al-Musallahah) dan mengumumkan akan menunda konstitusi hingga terbentuk sebuah parlemen baru.

Masih di belahan utara Afrika, protes anti pemerintah di Libya berawal pada 15 Januari di Baydha. 18 Februari, pasukan oposisi telah menguasai Benghazi, kota terbesar kedua setelah Tripoli. Sebagai jawaban, pemerintah Libya mengirimkan pasukan elite dan tentara bayaran untuk menangkap para pemberontak, tapi mereka bisa ditangkis. Protes terus saja menggelombang, menyebar hingga sampai

ke Tripoli, dengan sasaran kantor televisi milik Putra Mahkota, Saif al-Islam Qadhafi. Protes terus saja berlanjut hingga beberapa diplomat kemudian menyatakan mundur.

Oposisi Libya anti-Qadhafi tak mudah menyerah. 26 Februari, di Benghazi, mereka membentuk “pemerintahan” sementara: al-Majlis al-Wathani al-Intiqaly (National Transitional Council/NTC). Namun, Kolonel Muammar Qadhafi juga bukan orang yang mudah bertekuk lutut. Ia mengeluarkan pasukan terbaiknya. Revolusi Libya kala itu memuncak pada perang sipil (*civil war*). Dalam kasus Libya, Barat sangat vokal dan mengintervensi secara terang-terangan. Pada 17 Maret, DK PBB mengeluarkan resolusi zona larangan terbang di Libya. Dua hari kemudian, Perancis, Amerika, dan Inggris menyusul ikut campur dengan mengebom pusat-pusat para loyalis Qadhafi.

Akhir Agustus 2011, pasukan anti-Qadhafi berhasil menguasai Tripoli. Pemerintahan Qadhafi kemudian bubar dan menandai akhir dari 42 tahun autokrasinya. Beberapa institusi pemerintahan Qadhafi kemudian dikelompokkan di Sirte, di mana Qadhafi menjadikannya sebagai ibu kota baru. 20 Oktober, NTC mengambil alih Sirte, dan berhasil menewaskan Qadhafi.

Menyeberang ke Timur Tengah belahan utara, gerakan protes di Suriah bermula pada 26 Januari, menyusul laporan adanya insiden bakar diri. Kekhawatiran pemerintahan Bashar al-Assad diwujudkan dengan mengeluarkan pasukan keamanan. 6 Maret, pasukan keamanan Suriah telah menangkap sekitar 15 anak-anak di Daraa, kawasan di belahan selatan Suriah. Anak-anak itu disiksa secara

sadis. Daraa adalah kota pertama yang memunculkan protes melawan rezim Baathis yang berkuasa sejak 1963 itu. Ratusan pemrotes sempat terhimpun di Damaskus, Aleppo, Hasakah, Daraa, dan Hama pada 15 Maret, yang kemudian menjadikan politisi Suhair Atassi sebagai juru bicara “Revolusi Suriah”. Sebulan kemudian, kurang lebih seratus ribu pemrotes bergabung di alun-alun Homs.

Di Yaman, gelombang protes bermula pada pertengahan Januari, baik di belahan utara maupun selatan. Para demonstran pada mulanya menginginkan pemerintah Yaman untuk memodifikasi konstitusi, menangani kasus korupsi, dan kondisi ekonomi serta masalah pengangguran. Namun, tuntutan mereka kemudian berujung pada permintaan kepada Presiden Ali Abdullah Saleh untuk mundur. Pada 27 Januari, 16 ribu demonstran menduduki Sanaa. Aktivistik politik, Tawakkul Karman yang kelak mendapat hadiah nobel, mengumumkan 3 Februari sebagai “Day of Rage”. Mungkin tak tahan dengan tekanan dari para demonstran, Saleh lalu memberikan kekuasaan kepada wakil presiden, Abd ar-Rab Mansur al-Hadi.

Di Bahrain, gerakan protes pada mulanya menuntut kebebasan politik dan penghormatan kepada HAM. Ada semacam ketidakadilan dirasakan oleh orang-orang Syiah yang menjadi mayoritas, tapi diperintah oleh pemerintahan Sunni. Protes yang bermula pada 14 Februari itu secara umum berjalan damai. Hingga kemudian pada malam 17 Februari, polisi menembak 3 orang demonstran yang tidur di bundaran Manama. Maka, keinginan protes pun berujung pada tuntutan agar rezim monarki segera mundur. 22 Februari, 100 ribu

penduduk Bahrain, hampir setengah dari total populasi, melakukan *marching*.

Pemerintah Bahrain yang Sunni itu cukup dekat dengan Arab Saudi. Mungkin sebab khawatir akan kehilangan koleganya di kawasan Teluk, maka Putra Mahkota Saudi menurunkan pasukan bantuan dari Gulf Cooperation Council (GCC), membantu menangani para demonstran Bahrain. Tak tahan dengan ikut campurnya Arab Saudi, kekuatan Syiah dari Iran juga turun tangan. Raja Hamad bin Isa al-Khalifa lantas mengumumkan 3 bulan negara dalam keadaan darurat pada 15 Maret. Sehari kemudian, pasukan keamanan Bahrain dibantu oleh pasukan militer dari GCC mengevakuasi, membuldoser, dan menembaki perkemahan para demonstran.

Di Irak, untuk menghadang kemunculan protes, pagi-pagi PM Nouri al-Maliki mengumumkan dia tidak akan turun sebelum habis masa jabatannya pada 2014. Kendati demikian, ratusan pendemo berhimpun di beberapa daerah, utamanya di Baghdad dan Karbala pada 12 Februari, menuntut adanya keterbukaan akses publik dan investigasi beberapa kasus korupsi. Sempat juga dikabarkan bahwa seorang lelaki 31 tahun membakar dirinya, memprotes tingginya angka pengangguran. 16 Februari, lebih dari 2.000 pemrotes menguasai gedung dewan provinsi di Kota Kut. Para pemrotes menuntut agar pemerintah provinsi segera mundur karena tak becus menangani masalah listrik dan air.

Perbatasan Palestina pun ikut tersulut. Sempat muncul halaman *Facebook* yang mengajak diadakannya “Intifada Ketiga” pada 15 Mei. Halaman itu menuntut hak kembalinya para pengungsi Palestina—mereka hendak menyebutnya